

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN
(Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Sarjana Akuntansi
Program Studi S1 Akuntansi

ICHA OKTAVIANI

NPM : C10160110



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS

BANDUNG

2020

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN
(Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I)**

**ICHA OKTAVIANI
NPM : C10160110**

Bandung, 10 Maret 2020

Pembimbing

Drs. Bambang Rismadi, M.Si., Ak., CA

Mengetahui,

Ketua STIE EKUITAS



Prof. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, CSP

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi



Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA

Tanggung jawab yuridis ada pada peneliti

PERNYATAAN
PROGRAM SARJANA

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan nama jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah yang disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak-benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh, karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, 10 Maret 2020

Icha Oktaviani

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN
(Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I)**

Disusun Oleh:

Icha Oktaviani

C10160110

Pembimbing:

Drs. Bambang Rismadi, M.Si., Ak., CA.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan anggaran (X1) meliputi partisipasi semua elemen, akurasi data, perencanaan dan kebutuhan, dan revisi dan perubahan sedangkan untuk pelaksanaan anggaran (X2) meliputi internal satuan kerja, pengadaan barang dan jasa, dan mekanisme pembayaran. Untuk variabel dependen (Y) adalah penyerapan anggaran.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif dan verifikatif sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui penyebaran kuesioner dan kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Besarnya pengaruh kedua variabel tersebut terhadap penyerapan anggaran yang dapat dijelaskan oleh nilai koefisien determinasi adalah sebesar 39,3% sedangkan sisanya 60,7% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian.

Kata Kunci: Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Penyerapan Anggaran

**THE EFFECT OF BUDGET PLANNING AND BUDGET
IMPLEMENTATION TO BUDGET ABSORPTION**

(Study at Unit of Work in the Payment Area of KPPN Bandung I)

Written by:

Icha Oktaviani

C10160110

Preceptor:

Drs. Bambang Rismadi, M.Si., Ak., CA.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of budget planning and budget implementation to budget absorption. The independent variable in this study is budget planning (X1) includes participation of all elements, data accuracy, planning and needs, and revisions and changes while for budget implementation (X2) includes internal unit of work, procurement of goods and services, and payment mechanisms. The dependent variable (Y) is budget absorption.

This research was conducted using descriptive and verification research methods while the population in this study was unit of work in the payment area of KPPN Bandung I. The technique of determining the sample used a purposive sampling technique. Data collection is carried out through the distribution of questionnaires and literature. The analytical method used is multiple linear regression analysis.

The results showed that either simultaneously and partially, budget planning and budget implementation had a positive and significant influence on budget absorption. The magnitude of the influence of these two variables on budget absorption which can be explained by the coefficient of determination is 39.3% while the remaining 60.7% is influenced by other variables excluded within this research.

Keywords: Budget Planning, Budget Implementation, and Budget Absorption

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamua'laikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini berupa skripsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi S1 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik isi maupun bahasanya. Hal ini karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang peneliti miliki, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sangat membangun untuk dijadikan bahan masukan guna penulisan yang akan datang sehingga menjadi lebih baik lagi.

Peneliti menyadari tanpa adanya bimbingan, dorongan, nasihat, serta doa dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Kedua orangtua tercinta Karyadi dan Dedeh Kusmiati, serta kakak tercinta Iis Ismayanti dan Laela Fitriani yang telah memberikan dukungan materiil dan moril yang tidak ternilai demi kelancaran dan keberhasilan peneliti.
2. Dr.rer.nat. Martha Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP. selaku Ketua STIE EKUITAS Bandung.

3. Dr. Ir. Dani Dagustani, MM. selaku Wakil Ketua I STIE EKUITAS Bandung.
4. Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM. selaku Wakil Ketua II STIE EKUITAS Bandung.
5. Dr. Sudi Rahayu, SE., MM. selaku Wakil Ketua III STIE EKUITAS Bandung.
6. Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 STIE EKUITAS Bandung.
7. Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd., M.Ak. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi S1 STIE EKUITAS Bandung sekaligus selaku Wali Dosen Akuntansi 3 yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan selama menempuh perkuliahan di STIE EKUITAS Bandung.
8. Bapak Drs. Bambang Rismadi M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah membantu membimbing dan memberikan masukan kepada peneliti di STIE EKUITAS Bandung.
9. Seluruh dosen pengajar program studi S1 Akuntansi STIE EKUITAS juga staf dan karyawan STIE EKUITAS Bandung.
10. Teman-teman seperjuangan Akuntansi 3 terutama Tia Sofa Lestari, Susi Susilawati, Lia Julianti, Rina Maulani, Sellymitha Aprianti dan Annafi Fiola Lestari yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama penyusunan penelitian.
11. Rekan satu bimbingan Fitri Diani dan Akbar Tandiat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama penyusunan penelitian.

12. Elsa Hasna, Dhea Adelia dan Irma Silvia yang selalu memberi semangat, doa, dan keceriaan.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan tepat waktu.

Akhir kata, semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bandung, 10 Maret 2020

Icha Oktaviani

DAFTAR ISI

JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	10
1.3.1 Maksud Penelitian	10
1.3.2 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.4.1 Kegunaan Teoritis	11
1.4.2 Kegunaan Praktis	11
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN.....	12
2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.1.1 Anggaran Sektor Publik	12
2.1.2 Belanja Pemerintah Pusat.....	15
2.1.3 Perencanaan Anggaran.....	18
2.1.4 Pelaksanaan Anggaran	23
2.1.5 Penyerapan Anggaran	30
2.1.6 Penelitian Terdahulu	32
2.2 Kerangka Pemikiran	36
2.2.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran	36
2.2.2 Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran	36
2.2.3 Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran	37
2.3 Hipotesis Penelitian	39
 BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	 40
3.1 Objek Penelitian	40
3.2 Metode Penelitian.....	41
3.2.1 Metode yang Digunakan	41
3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	42
3.2.3 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel	44
3.2.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	46
3.2.5 Teknik Analisis Data.....	48
3.2.6 Uji Instrumen Penelitian	48

3.2.7	Pengujian Hipotesis.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		57
4.1	Hasil Pengujian Instrumen Penelitian	57
4.1.1	Karakteristik Data Responden.....	57
4.1.2	Gambaran Variabel Penelitian	61
4.1.3	Uji Validitas	68
4.1.4	Uji Reliabilitas	71
4.2	Hasil Penelitian.....	73
4.2.1	<i>Method of Successive Interval</i>	73
4.2.2	Analisis Regresi Berganda	73
4.2.3	Analisis Koefisien Determinasi	75
4.2.4	Pengujian Hipotesis.....	76
4.3	Pembahasan	78
4.3.1	Perencanaan Anggaran pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I.....	78
4.3.2	Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I.....	79
4.3.3	Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I.....	79
4.3.4	Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I.....	80
4.3.5	Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I.....	81

4.3.6	Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		83
5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I.....	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel	43
Tabel 3.2	Ukuran Penilaian Untuk Variabel X1, X2, Y	47
Tabel 3.3	Kriteria Persentase Skor Tanggapan Responden	50
Tabel 4.1	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel 4.2	Profil Responden Berdasarkan Usia	58
Tabel 4.3	Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	59
Tabel 4.4	Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja	60
Tabel 4.5	Profil Responden Berdasarkan Jabatan.....	61
Tabel 4.6	Profil Responden Berdasarkan Kursus/Diklat/Bimtek yang Telah Diikuti.....	61
Tabel 4.7	Kriteria Persentase Skor Tanggapan Responden	62
Tabel 4.8	Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Mengenai Perencanaan Anggaran (X1).....	63
Tabel 4.9	Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Anggaran (X2).....	65
Tabel 4.10	Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Mengenai Penyerapan Anggaran (Y).....	67
Tabel 4.11	Hasil Uji Validitas Variabel Perencanaan Anggaran	69
Tabel 4.12	Hasil Uji Validitas Variabel Pelaksanaan Anggaran	69

Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Variabel Penyerapan Anggaran	70
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Perencanaan Anggaran	71
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pelaksanaan Anggaran.....	72
Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penyerapan Anggaran.....	72
Tabel 4.17 Hasil Perhitungan Analisis Regresi Berganda	74
Tabel 4.18 Hasil Analisis Koefisien Determinasi	75
Tabel 4.19 Hasil Perhitungan Uji t Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran	76
Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Uji t Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran	76
Tabel 4.21 Hasil Perhitungan Uji F	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Paradigma Penelitian.....	39
Gambar 3.1	Garis Kontinum.....	50
Gambar 4.1	Garis Kontinum Kategori Perencanaan Anggaran.....	64
Gambar 4.2	Garis Kontinum Kategori Pelaksanaan Anggaran	66
Gambar 4.3	Garis Kontinum Kategori Pelaksanaan Anggaran	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi
- Lampiran 2 *Photocopy* Formulir Pengajuan Penulisan Skripsi
- Lampiran 3 *Photocopy* Kartu Bimbingan
- Lampiran 4 *Photocopy* Surat Permohonan Perubahan Topik/Judul Skripsi
- Lampiran 5 *Photocopy* Surat Permohonan Penelitian ke KPPN Bandung I
- Lampiran 6 *Photocopy* Surat Balasan Permohonan dari KPPN Bandung I
- Lampiran 7 Daftar Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I
- Lampiran 8 Data Sampel Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN
Bandung I
- Lampiran 9 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 10 Daftar Tabel Uji r
- Lampiran 11 Daftar Tabel Uji t
- Lampiran 12 Daftar Tabel Uji F
- Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan merupakan instrumen yang sangat penting bagi setiap negara untuk memajukan bangsa dan menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara ke arah yang lebih baik melalui penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Haryadi, 2014:82). Setiap tahunnya, pemerintah membuat rencana keuangan tahunan yang tertuang dalam APBN yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam struktur APBN, belanja pemerintah pusat memainkan peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan nasional terutama dalam meningkatkan dan memelihara kesejahteraan rakyat. Hal ini terutama karena besaran dan komposisi anggaran belanja pemerintah pusat dalam operasi fiskal pemerintah mempunyai dampak yang signifikan pada permintaan agregat dan *output* nasional, serta mempengaruhi alokasi sumber daya dalam perekonomian. Besaran belanja pemerintah pusat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Peningkatan porsi belanja pemerintah pusat dari tahun ke tahun tersebut tidak diimbangi dengan pola penyerapan anggaran yang maksimal. Salah satu permasalahan dalam penyerapan anggaran pemerintah adalah melesetnya target penyerapan anggaran, sebagian besar satuan kerja sangat rendah tingkat penyerapan anggarannya di awal tahun anggaran, kemudian terjadi peningkatan pada triwulan berikutnya dan baru terjadi peningkatan secara signifikan di triwulan akhir (Nugroho dan Alfarisi, 2017).

Bank dunia menyebutkan negara-negara berkembang termasuk Indonesia memiliki permasalahan dalam penyerapan anggaran yang disebut *slow back loaded* yang artinya penyerapan rendah pada awal sampai dengan tengah tahun anggaran, namun melonjak memasuki akhir tahun anggaran. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Jika penyerapan anggaran dapat dioptimalkan secara merata pada setiap semesternya maka manfaat juga akan lebih cepat dirasakan masyarakat. Selain penyerapan anggaran yang cenderung menumpuk di akhir tahun, terdapat juga permasalahan di mana penyerapan anggaran di akhir tahun yang tidak mencapai 100% (BPKP).

Kegagalan target penyerapan anggaran memang berakibat hilangnya manfaat belanja. Hal ini dikarenakan dana yang dialokasikan tidak semuanya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur (*idle money*). Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis pemerintah. Penyerapan anggaran dengan pemanfaatan belanja dilakukan untuk kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas, untuk

membiyai berbagai macam kegiatan pelayanan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, penyuluhan kesehatan, perbaikan jalan, dan lain sebagainya.

Dilansir dari [Tribunnews.com](https://m.tribunnews.com), Sekjen Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan bahwa, “Di kuartal II penyerapan anggaran setiap tahunnya tidak sesuai dengan harapan, paling di bawah 40%-50% bukan hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat tetapi tingkat pemerintah daerah juga seperti itu”. Bahkan dalam hasil *Public Expenditure and Financial Accountability* (PEFA) menyebutkan bahwa, “Indonesia untuk belanja pemerintah dinilai C yaitu di bawah rata-rata dalam keandalan anggaran”. Ia mengatakan, “Meskipun penyerapan anggaran selesai di kisaran 90% di akhir tahun, yang harus dijadikan pertanyaan adalah kualitasnya bagaimana dan *outcome* atau efek jangka panjangnya seperti apa”. (Sumber: <https://m.tribunnews.com>)

Menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun juga dialami oleh satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I. Dilansir dari djpbk.kemenkeu.go.id, dalam penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Semester I tahun 2018, Kepala KPPN Bandung I menyebutkan bahwa, “Penyerapan anggaran pada semester I sebesar 35% dari pagu anggaran yang terdapat dalam dokumen DIPA seluruh satuan kerja dalam wilayah bayar KPPN Bandung I”. Di mana pada tahun 2018, penyerapan anggaran satuan kerja di wilayah bayar KPPN Bandung I pada tiga bulan pertama di semester I baru mencapai 13,7% dan tiga bulan berikutnya mencapai 36,9%. Sedangkan, untuk total penyerapan sampai dengan bulan Desember 2018 mencapai 93,1%. Dari data tersebut terjadi lonjakan penyerapan anggaran di semester II sebesar 56,2%.

Tabel 1.1 Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja di Wilayah

Pembayaran KPPN Bandung I

Tahun	Triwulan	Akumulasi Belanja		
		Pagu Anggaran (Miliar Rp.)	Realisasi (Miliar Rp.)	% (kumulatif) thd Realisasi
2016	I	9.416,8	1.178,2	12,5%
	II	9.610,6	3.729,0	38,8%
	III	9.420,6	5.885,2	62,5%
	IV	9.723,7	8.670,3	89,2%
2017	I	8.401,0	1.037,4	12,3%
	II	8.542,1	3.318,2	38,8%
	III	8.911,4	5.419,9	60,8%
	IV	8.952,4	8.155,9	91,1%
2018	I	9.603,8	1.320,7	13,7%
	II	9.866,3	3.645,6	36,9%
	III	10.525,8	6.136,0	58,3%
	IV	10.456,4	9.733,2	93,1%

Sumber: diolah dari Laporan Pagu dan Realisasi Anggaran 2016-2018

Tabel 1.1 menunjukkan pola penyerapan anggaran belanja satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah pembayaran KPPN Bandung I. Untuk tahun 2016 sampai 2018 masing-masing mencapai 89,2%, 91,1%, dan 93,1%. Dilihat dari data tersebut, walaupun setiap tahunnya terjadi peningkatan dalam penyerapan anggaran, namun pola penyerapan di setiap semester selalu berulang dan tidak sampai 50%. Tren penyerapan yang cenderung akselerasi pada akhir semester kedua menunjukkan bahwa pola ini akan menimbulkan risiko akuntabilitas keuangan negara, seperti memaksakan pelaksanaan kegiatan yang tidak perlu, lemahnya perencanaan kegiatan, dan menurunnya kualitas pelaksanaan kegiatan. Sedangkan, rendahnya penyerapan anggaran menimbulkan risiko makro dan tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi (BPKP).

Perencanaan menjadi faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. BPKP (2011:15) menyebutkan terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam proses perencanaan anggaran yang dapat menyebabkan keterlambatan atau kurang optimalnya penyerapan anggaran, diantaranya: **pertama**, perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan karena masih adanya anggapan bahwa tidak semua anggaran yang diusulkan akan disetujui sehingga anggaran yang diusulkan lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memperhatikan kebutuhan riil di lapangan dan kemudahan dalam implementasinya (Septionava dan Helmy dalam Malahayati dkk, 2015). Hal ini akan berakibat pada DIPA perlu dilakukan revisi. Revisi DIPA tersebut menyebabkan jadwal kegiatan harus dilakukan penyesuaian dan akan berpengaruh pada mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan atau program kerja.

Kedua, ketidaklengkapan data pendukung penyusunan anggaran sehingga anggaran kegiatan diblokir/tanda bintang. Anggaran kegiatan diblokir mengakibatkan anggaran tidak dapat dicairkan sampai dengan blokir dibuka. **Ketiga**, salah dalam penentuan akun yang berdampak pada dokumen anggaran perlu direvisi dan penolakan pembayaran oleh KPPN. **Keempat**, penyusunan anggaran terlalu rendah atau tidak sesuai dengan harga pasar yang mengakibatkan anggaran tidak terealisasi. **Kelima**, adanya penyesuaian harga karena kebijakan pemerintah. Dalam situasi ekonomi tidak pasti, pelaksanaan anggaran belum tentu sama dengan pada saat pelaksanaan. **Keenam**, tidak mengalokasikan atau menganggarkan biaya pendukung dan administrasi pengadaan. Ketiadaan biaya administrasi pengadaan pada saat penyusunan anggaran bisa mengakibatkan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat yang pada gilirannya dapat mengganggu

realisasi penyerapan anggaran. **Terakhir**, ketidaksesuaian dokumen seperti TOR (*Term of Reference*)/RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat bahkan menjadi sulit direalisasi.

Kurang matangnya perencanaan dan aspek keterlambatan tersebut merupakan salah satu faktor penyebab pelaksanaan kegiatan dilakukan tidak sesuai perencanaannya. Artinya, rencana penarikan dana yang tercantum dalam DIPA yang sudah direncanakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan disetujui oleh menteri keuangan tidak dilaksanakan sesuai perencanaan. Perencanaan anggaran yang akurat akan memudahkan tahap pelaksanaan anggaran dan memungkinkan tercapainya target secara efektif. Sebaliknya, ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran mengakibatkan sulitnya pelaksanaan anggaran yang berdampak pada lambatnya proses penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Herryanto (dalam Jauhari, 2017) yang menunjukkan hasil bahwa perencanaan yang tidak matang mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal.

Selain perencanaan anggaran, menurut Kuswoyo (dalam Malahayati dkk, 2015) penyerapan anggaran juga dipengaruhi oleh pelaksanaan anggaran. Di mana pelaksanaan anggaran dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai atau lebih tepatnya pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Pada tahap ini, sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi di mana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat.

Dalam pelaksanaan anggaran, persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja meliputi keterlambatan penetapan surat keputusan tenaga pengelola keuangan, kebiasaan pengelola keuangan menunda pekerjaan, serta tidak adanya mekanisme *reward* dan *punishment* bagi keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan di satuan kerja juga menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran (Miliasih dalam Malahayati, 2015). Bulan Januari setelah dokumen DIPA sudah diterima oleh satuan kerja, pejabat pengelola anggaran seharusnya sudah ada atau terbentuk. Jika mengalami keterlambatan, hal ini tentu akan mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan keuangan atau penyerapan anggaran pada awal tahun anggaran.

Terkait proses pengadaan barang dan jasa. Ketakutan dan kehati-hatian dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa akibat pengaduan dan pemberitaan karena tuduhan korupsi dan buruknya pelaksanaan barang dan jasa juga memberi kontribusi bagi lambatnya penyerapan anggaran (Siswanto dan Rahayu dalam Malahayati dkk, 2015). Dalam proses pengadaan barang dan jasa, ada prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses tersebut, diantaranya efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Keenam prinsip tersebut diterapkan dengan tujuan mendorong praktik pengadaan barang dan jasa yang baik dalam menekan kebocoran anggaran (*clean governance*).

Persoalan terakhir dalam pelaksanaan anggaran yaitu terkait dengan proses mekanisme pembayaran. Persoalan yang terjadi dalam mekanisme pembayaran disebabkan oleh kesalahan dalam dokumen pendukung pencairan dana yang seringkali tidak tepat atau tidak lengkap sehingga terjadi penolakan pembayaran

oleh KPPN. Selain itu, pencairan pembayaran kepada pihak rekanan tidak optimal/sering terlambat disebabkan pihak rekanan tidak mengajukan tagihan uang muka atau karena dokumen bukti tagihan yang tidak lengkap, serta Ganti Uang Persediaan terlambat diajukan (Tunggal dalam Malahayati dkk, 2015).

Menurut Suryopratomo (dalam Jauhari, 2017) “kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan merupakan persoalan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, akibatnya anggaran yang telah disahkan tidak selalu dapat terpakai dan tidak terserap dalam program yang telah ditetapkan”. Penelitian Siswanto dan Rahayu (2010), Kuswoyo (2011), Herriyanto (2012), Malahayati (2015) dan Jauhari (2017) membuktikan bahwa faktor perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran memberi pengaruh bagi penyerapan anggaran.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih satuan kerja kementerian/lembaga yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I. KPPN Bandung I dijadikan sebagai lokus penelitian dengan pertimbangan, antara lain: merupakan kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bawah Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Barat; KPPN Bandung I selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) bertugas dalam proses pencairan dana APBN yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkup pembayaran KPPN Bandung I; KPPN Bandung I berlokasi di Kota Bandung sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian: serta mempunyai beban kerja yang besar dengan jumlah satuan kerja yang dilayani lebih banyak yaitu 172 satuan kerja dari 29 Kementerian/Lembaga meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian dilakukan untuk melihat dan mempelajari pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I maka penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana gambaran perencanaan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I.
2. Bagaimana gambaran pelaksanaan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I.
3. Bagaimana gambaran penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I.
4. Bagaimana pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I.
5. Bagaimana pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I.
6. Bagaimana pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan gambaran perencanaan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I.
2. Untuk menjelaskan gambaran pelaksanaan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I.
3. Untuk menjelaskan gambaran penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I.
4. Untuk menjelaskan pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I.
5. Untuk menjelaskan pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I.
6. Untuk menjelaskan pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik khususnya di bidang anggaran dan juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di masa mendatang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dalam penggunaan anggaran belanja agar sesuai dengan rencana kegiatan sehingga di masa mendatang anggaran belanja dapat lebih bermanfaat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan di KPPN Bandung I yang beralamat di Jl. Asia Afrika No. 141 Bandung. Adapun waktu penelitian dimulai bulan Oktober 2019 sampai dengan Januari 2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan tinjauan secara luas mengenai teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian sebelumnya yang digunakan dalam mendukung penelitian dengan pembahasan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa konsep teori dan hasil penelitian secara luas dikemukakan dalam pembahasan di bawah ini.

2.1.1 Anggaran Sektor Publik

2.1.1.1 Definisi Anggaran Sektor Publik

Istilah anggaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *budget*, berasal dari bahasa Perancis “*bougette*” yang artinya tas kecil. Menurut Sujarweni (2015:28), berdasarkan *National Committee on Governmental Accounting* (NCGA) yang saat ini telah diubah menjadi *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) definisi anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Sedangkan pengertian anggaran menurut Mardiasmo (2018:75) adalah sebagai berikut:

“Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran”.

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang beragam, hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Menurut Mardiasmo (2018:75) mendefinisikan anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Pengertian anggaran sektor publik menurut Sujarweni (2015:28) adalah sebagai berikut:

“Anggaran sektor publik adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik”.

Sedangkan menurut Nordiawan dan Hertianti (2011:70) mendefinisikan anggaran sektor publik sebagai berikut:

“Anggaran sektor publik dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan hal-hal berikut:

1. Rencana-rencana organisasi sektor publik untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber dana yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut.”

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan rencana finansial yang menyatakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik, yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter dan didanai dengan uang publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan lain.

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Pokok Siklus Anggaran

Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintah. Pada dasarnya prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbeda antara sektor swasta dan sektor publik (Harley *at.al*, 1990). Menurut Mardiasmo (2018:87) siklus anggaran meliputi empat tahap, terdiri dari:

1. Tahap Persiapan Anggaran (*Budget Preparation*)

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

2. Tahap Ratifikasi Anggaran (*Budget Ratification*)

Tahap berikutnya adalah *budget ratification*. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki "*managerial skill*", namun juga harus mempunyai kemampuan antara lain "*political skill*" dan "*coalition building*" yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran (*Budget Implementation*)

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan andal untuk perencanaan dan pengendalian yang telah disepakati dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang baik meliputi pula dibuatnya sistem pengendalian intern yang memadai.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap *budget reporting and evaluation* tidak akan menemui banyak masalah.

2.1.2 Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat merupakan bagian dari belanja negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis belanja, antara lain:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk barang maupun uang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai dapat dibedakan menjadi belanja gaji, honorarium, uang lembur, dan lain-lain.

2. Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Belanja barang dapat dibedakan menjadi belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja honorarium yang terkait dengan *output* kegiatan.

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset kementerian negara/lembaga dengan kewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan. Belanja modal dapat dibedakan menjadi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya.

4. Pembiayaan Bunga Utang

Pembiayaan bunga utang merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.

5. Subsidi

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja ini, antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada perusahaan negara dan perusahaan swasta.

6. Belanja Hibah

Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada pemerintah negara lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi internasional.

7. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial yaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan.

8. Belanja Lain-Lain

Pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan diharapkan tidak berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran yang tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.

2.1.3 Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran (periode Januari s.d Juli) merupakan tahap penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal disiapkan oleh Pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia. Kegiatan perencanaan anggaran dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). RKP/RKA-K/L mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks perencanaan pembangunan pemerintah, maka penyusunannya berpedoman pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah telah merencanakan target-target pembangunan di masa mendatang.

Proses perencanaan dalam kegiatan penganggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Sejak dua belas bulan sebelum tahun anggaran dimulai, proses perencanaan dan penganggaran sudah dimulai. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013:127) perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Tidak adanya konsep perencanaan penggunaan anggaran secara riil tentu akan berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran.

Mardiasmo (dalam Anisa, 2017) menyatakan anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

1. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
2. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
3. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

Perencanaan yang buruk adalah hambatan yang signifikan yang mencegah penyerapan anggaran. Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, diantaranya partisipasi semua elemen, akurasi data, perencanaan dan kebutuhan serta revisi atau perubahan (Zarinah dkk, 2016).

BPKP (2011:15) menyatakan beberapa persoalan yang sering terjadi dalam perencanaan anggaran, yaitu:

Perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan. Salah satu prinsip penganggaran adalah berbasis kinerja yaitu penyusunan anggaran yang didasarkan pada target kinerja yang ditetapkan terlebih dahulu. Idealnya, kegiatan yang direncanakan merupakan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan baik, jenis maupun jumlahnya. Proses perencanaan yang baik diharapkan dapat meminimalisir deviasi antara kebutuhan dengan jenis dan jumlah kegiatan yang dicantumkan dalam RKA-K/L.

Dalam penganggaran seringkali menghadapi kendala berkaitan dengan pencantuman biaya yang dianggarkan untuk melaksanakan rencana kerja. Pada tahap awal, satuan kerja kementerian/lembaga mendasarkan rencana kerja dan anggaran pada pagu indikatif yang sifatnya *given*. Pada kondisi ini bukan pembiayaan yang menyesuaikan dengan rencana kegiatan, namun rencana kegiatan yang menyesuaikan dengan alokasi uang yang ada. Hal ini tentu mengganggu prinsip penganggaran berbasis kinerja, terutama apabila dalam proses pembahasan selanjutnya tidak terjadi perbaikan sesuai kebutuhan pendanaan yang sesungguhnya. Contoh, dalam kasus pengadaan genset yang memerlukan ruang penyimpanan termasuk instalasinya. Pada saat dana yang tersedia terbatas, bisa jadi yang muncul dalam DIPA hanya untuk pengadaan gensetnya saja. Oleh karenanya, satker tidak berani merealisasikan pengadaan tersebut karena khawatir genset yang tidak ditempatkan pada ruang yang memadai akan menjadi rusak.

Ketidaklengkapan data pendukung penyusunan anggaran.

Ketidaklengkapan data pendukung sampai pada tahap terakhir kegiatan penelaahan RKA-K/L bisa mengakibatkan anggaran kegiatan diblokir/dibintang. Misalnya, dalam rencana kegiatan pembangunan gedung belum dilengkapi analisis perhitungan biaya. Keterlambatan/kegagalan pemenuhan data pendukung pada tahap pelaksanaan anggaran bisa mengakibatkan proses pelaksanaan kegiatan tertunda atau bahkan gagal dilaksanakan.

Salah penentuan akun, sehingga perlu melakukan revisi dokumen anggaran. Kesalahan penetapan akun belanja pada saat penganggaran berimplikasi pada saat merealisasikan anggaran tersebut. Misal, dalam rangka menghasilkan aset tetap dibiayai dengan non belanja modal atau sebaliknya, belanja yang tidak menghasilkan aset tetap dibiayai dengan belanja modal. Meskipun sudah ada mekanisme penelaahan yang bisa meminimalisir masalah ini, namun apabila terjadi akan menimbulkan masalah dalam pencairan yang menuntut adanya revisi terlebih dahulu sebelum bisa dieksekusi. Hal ini tentu memberikan tambahan waktu yang memperlambat penyerapan anggaran.

Penyusunan pagu anggaran terlalu rendah (tidak sesuai harga pasar).

Pada saat penyusunan anggaran pengadaan barang dan jasa, seharusnya didasarkan pada survei pasar serta mempertimbangkan kemungkinan kenaikan harga pada tahun pelaksanaan. Apabila hal ini tidak dipenuhi bisa mengakibatkan pagu anggaran yang diperoleh terlalu rendah untuk bisa dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa yang bisa menggagalkan pelaksanaan anggaran kegiatan.

Adanya penyesuaian harga karena adanya kebijakan pemerintah (ekskalasi). Dalam situasi ekonomi tidak pasti, anggaran yang disusun saat ini belum tentu memenuhi harga wajar pada saat pelaksanaan nanti. Demikian juga kondisi relevan yang menjadi acuan pada saat penyusunan anggaran belum tentu sama dengan pada saat pelaksanaan. Misalnya, pengiriman logistik dalam rangka pemilu, pada saat tahun pelaksanaan pemerintah memutuskan adanya kenaikan harga BBM, sehingga menimbulkan *cost* tambahan. Dalam situasi ini, akan dilakukan eskalasi yang besarnya memerlukan analisis perhitungan sebelum ditetapkan menjadi harga kontrak pengiriman yang baru.

Tidak mengalokasikan/menganggarkan biaya pendukung dan administrasi pengadaan. Untuk pengadaan barang dan jasa adakalanya diperlukan biaya-biaya pendukung, termasuk biaya administrasi proses pengadaan. Biaya tersebut mencakup biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya pelatihan, dan biaya lain-lain. Sementara biaya administrasi, mencakup biaya pengumuman pengadaan, honorarium pejabat pelaksana pengadaan, biaya survei lapangan/pasar, biaya penggandaan dokumen pengadaan, dan lainnya. Ketiadaan biaya administrasi pengadaan pada saat penyusunan anggaran bisa mengakibatkan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat yang pada gilirannya dapat mengganggu realisasi penyerapan anggaran.

Term of Reference (TOR) salah/tidak lengkap. Kesalahan/ketidaklengkapan dalam penyusunan TOR bisa mempengaruhi hasil penelaahan yang berujung pada nilai alokasi yang ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan menjadi tidak tepat. Pada saat pelaksanaan kegiatan menjadi sulit direalisasi karena anggaran yang ada tidak sesuai dengan kondisi riil.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak sesuai dengan satuan biaya.

Dalam proses penyusunan RKA-K/L harus mengacu pada standar biaya yang berlaku pada tahun anggaran yang disusun. Apabila hal ini tidak ditaati, maka pada saat pelaksanaan anggaran akan menjadi tidak cocok karena akan timbul kelebihan atau kekurangan biaya. Dalam hal terjadi kelebihan anggaran di atas standar biaya, akan menimbulkan sisa anggaran yang tidak dapat diserap. Sebaliknya dalam hal terjadi kekurangan anggaran di bawah standar biaya, bisa menimbulkan hambatan atau bahkan membatalkan pelaksanaan kegiatan karena dukungan biayanya tidak memadai.

2.1.4 Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan Anggaran (periode Januari s.d Desember). Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran.

Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan, dokumen pembayaran antara lain terdiri dari, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa, “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan”. Lebih lanjut, pedoman dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pada tahap ini, sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Proses pelaksanaan meliputi pengaturan terhadap penggunaan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanaannya. Pelaksanaan anggaran adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011).

Pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas yang dilaksanakan, yang terkait dengan penggunaan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi di mana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis maupun kronologis. Walaupun demikian, proses pelaksanaannya tidak menjadi sederhana karena adanya mekanisme yang menjamin ketaatan pada program pendahuluan. Bahkan dengan perkiraan yang baik sekalipun, akan ada perubahan-

perubahan tidak terduga dalam lingkungan ekonomi makro dalam tahun yang bersangkutan yang perlu diperlihatkan dalam anggaran. Persoalan yang seringkali terjadi dalam proses pelaksanaan anggaran, diantaranya:

Persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satker. Persoalan-persoalan yang timbul dalam internal satuan kerja seharusnya dapat diminimalisir apabila satuan kerja menerapkan pengelolaan manajemen yang efektif. Hasil penelitian Miliasih (dalam Malahayati dkk, 2015) mengemukakan permasalahan yang timbul di dalam satuan kerja terkait penyerapan anggaran berasal dari kebijakan teknis. Permasalahan kebijakan teknis satuan kerja, seperti keterlambatan dalam penunjukan pejabat pengelola anggaran.

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) membuat Surat Keputusan (SK) tentang penunjukan pejabat pengelola anggaran satuan kerja di wilayah K/L-nya. Pejabat pengelola anggaran di satker, meliputi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang Selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah menteri/pimpinan lembaga atau kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satker Kementerian Negara/Lembaga.

Keterlambatan dalam pembentukan pejabat pengelola anggaran yang terjadi di satuan kerja adalah satker belum menerima SK di awal tahun anggaran.

Hal ini sering terjadi pada satker pengelola anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan. Keterlambatan penunjukan pejabat pengelola akan mempengaruhi waktu dimulainya pelaksanaan anggaran, juga akan berdampak pada penunjukan panitia pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan kegiatan satker yang melalui realisasi belanja barang/belanja modal.

Pengadaan Barang dan Jasa. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Adapun pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa terdiri dari pejabat pengadaan yaitu personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung dan pihak penyedia barang dan jasa, baik orang/perorangan ataupun badan usaha yang menyediakan barang/pekerjaan, konstruksi/jasa, dan konsultasi/jasa lainnya. Seorang pejabat pengadaan harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebagai bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang dan jasa.

Terkait proses pengadaan barang dan jasa. Sikap kehati-hatian pejabat pengadaan barang dan jasa dalam mengambil tindakan akibat pengaduan dan pemberitaan penangkapan pejabat karena tuduhan korupsi, kurangnya panitia pengadaan yang bersertifikat sehingga terjadi rangkap jabatan yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada kompetensi dari pejabat itu sendiri, serta buruknya pelaksanaan barang dan jasa juga memberi kontribusi bagi lambatnya penyerapan anggaran (Siswanto dalam Malahayati dkk, 2015).

Berdasarkan situs Departemen Keuangan (<https://bppk.kemenkeu.go.id>), menyebutkan terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam

proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Prinsip-prinsip dasar tersebut, diantaranya:

- a. Efisien, maksudnya adalah pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya seminimal mungkin untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dengan sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Efektif, artinya memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna, sehingga dapat diartikan prinsip efektif dalam proses pengadaan barang/jasa yaitu bagaimana proses pengadaan tersebut menghasilkan barang/jasa yang akan benar-benar bermanfaat dan berpengaruh bagi pemenuhan kebutuhan barang/jasa pemerintah.
- c. Terbuka dan bersaing, pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan yang jelas dan transparan agar tercipta persaingan yang sehat. Dengan prinsip terbuka ini, setiap penyedia yang kompeten akan mendapatkan kesempatan yang sama besar untuk mengikuti bahkan memenangkan lelang.
- d. Transparan, artinya ada kejelasan penyampaian informasi secara meluas kepada seluruh calon peserta. Informasi ini harus dapat diterima oleh setiap pemeran dunia usaha yang berpotensi ikut dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- e. Adil atau tidak diskriminatif, maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon-calon yang berminat. Ini ditujukan untuk menciptakan persaingan yang sehat dan tidak menguntungkan pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.

- f. Akuntabel, artinya dalam proses pengadaan barang dan jasa harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Selain tercapainya sasaran, prinsip akuntabel juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam proses pencapaian tersebut.

Sistem Pembayaran (Pencairan Anggaran). Belanja membebani anggaran setelah barang dan jasa diterima. Oleh karena itu, terdapat peraturan yang ketat tentang sistem pembayaran. Pada dasarnya, alokasi anggaran kepada satuan kerja akan diberikan jika sudah tersedia alokasinya dalam APBN. Berdasarkan dokumen pelaksanaan atau DIPA, satuan kerja dapat melakukan kegiatan perolehan barang/jasa. Barang dan jasa yang diperoleh harus diverifikasi kebenarannya. Setelah diverifikasi, selanjutnya dilakukan pembayaran.

Dalam pelaksanaan anggaran, pengguna anggaran diberikan kewenangan untuk membebani anggaran. Sebagai konsekuensinya pengguna anggaran dituntut untuk melakukan verifikasi atau pengujian atas kebenaran formil maupun materiil atas pelaksanaan anggaran serta mempertanggungjawabkannya. Apabila verifikasi terhadap belanja telah dilakukan dan sah maka pengguna anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN. Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

Berhubung satker harus mempertanggungjawabkannya maka bukti-bukti pengeluaran tetap disimpan di Kementerian/Lembaga dan tidak dikirim ke KPPN. KPPN tetap melakukan pengujian untuk mengecek ketepatan jumlah, peruntukan,

maupun penerimaannya. Apabila SPM tersebut dinyatakan memenuhi syarat maka KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bank Operasional terkait untuk memindahbukukan dari rekening KPPN ke Rekening Rekanan/Rekening Bendahara. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Sedangkan SPM yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada Pembuat SPM.

Terdapat dua cara pembayaran yaitu pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh BUN kepada yang berhak menerima pembayaran atau lebih dikenal dengan metode LS. Pembayaran ini dilakukan untuk pengeluaran yang telah pasti, baik jumlah, peruntukan, maupun penerimaannya. Cara lainnya adalah dengan menggunakan Uang Persediaan melalui Bendahara Pengeluaran. Pengeluaran dengan UP dilakukan untuk belanja yang nilainya kecil di bawah jumlah tertentu untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran.

Terkait dengan proses mekanisme pembayaran, kesalahan dalam dokumen pendukung pencairan dana seringkali tidak tepat atau tidak lengkap sehingga terjadi penolakan pembayaran oleh KPPN. Selain itu, pencairan pembayaran kepada pihak rekanan tidak optimal/sering terlambat dikarenakan pihak rekanan tidak mengajukan tagihan uang muka atau karena dokumen bukti tagihan yang tidak lengkap serta Ganti Uang Persediaan (GUP) terlambat diajukan (Tunggal dalam Malahayati dkk, 2015).

2.1.5 Penyerapan Anggaran

Menurut Kuncoro (2013:74) tingkat penyerapan anggaran yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target rencana yang telah dicapai oleh instansi. Sedangkan, menurut Noviwijaya dan Rohman (2013) penyerapan anggaran satuan kerja adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran.

BPKP mengungkapkan terdapat dua macam sudut pandang mengenai penyerapan anggaran, sudut pandang pertama adalah membandingkan anggaran dengan realisasinya secara sederhana, yang jelas menjelang akhir tahun anggaran instansi pemerintah berusaha menyerap anggaran mendekati 100% agar tidak dikatakan penyerapan anggarannya rendah. Misalnya, anggaran sebesar 100 juta sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar 91 juta berarti tingkat penyerapan anggaran sebesar 91%. Sudut pandang kedua adalah proporsionalitas persentase penyerapan anggaran. Seperti banyak diberitakan penyerapan anggaran cenderung menumpuk diakhir tahun, hal ini dibuktikan dengan kecenderungan persentase penyerapan anggaran pada akhir triwulan ketiga kurang dari 75%. Realisasi anggaran merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam penyerapan anggaran. Walaupun penyerapan anggaran belum jelas tolok ukurnya, namun realisasi anggaran dapat menjadi salah satu alat dalam menilai tingkat penyerapan anggaran.

Kegagalan target penyerapan anggaran berakibat pada hilangnya manfaat belanja. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti terjadi *inefisiensi* dan *inefektivitas* pengelolaan anggaran. BPKP menyebutkan jika ingin lebih profesional dalam menilai penyerapan anggaran yang telah disusun diawal,

perlu diingat ukuran kinerja yang dilihat dari capaian *output* serta *outcome*. Penyerapan anggaran yang tinggi tanpa adanya *outcome* atau *output* yang optimal akan menunjukkan kinerja yang kurang baik. Tingkat penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah sering menjadi topik utama dibahas oleh para pengamat ekonomi sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Kegagalan target penyerapan anggaran memang berakibat hilangnya manfaat belanja karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur (Putri, dkk 2017).

Meskipun penyerapan anggaran yang rendah bukan merupakan satu-satunya indikator untuk menilai keberhasilan kinerja keuangan pemerintah, namun pemerintah tetap harus menaruh perhatian terhadap ini. Apabila terus terjadi, dapat dipastikan target kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai, berarti ada uang pemerintah yang menganggur. Seharusnya dana tersebut dapat diinvestasikan pada tempat-tempat yang lebih produktif (BPKP, 2011).

Kondisi penyerapan anggaran yang rendah dan tidak proporsional menurut Miliasih (dalam Anisa, 2017) akan berimplikasi pada:

1. Lambatnya pelaksanaan kegiatan/program pemerintah dan akan berpengaruh kepada pelayanan publik.
2. Penundaan pencairan dana untuk belanja barang dan jasa menyebabkan fungsi stimulus fiskal dan *multiflier effect* dari belanja pemerintah terhadap aktivitas perekonomian masyarakat tidak optimal pada awal tahun anggaran.

3. Penumpukan tagihan kepada negara pada akhir tahun anggaran menyebabkan beban yang berat terhadap penyediaan uang kas pemerintah, sehingga dapat memungkinkan terjadinya *cash mismatch*.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran, yang penulis jadikan referensi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Malahayati dkk, (2015)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja	Variabel Dependen (Y) Serapan Anggaran Variabel Independen (X) Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1), Perencanaan Anggaran (X2), dan Pelaksanaan Anggaran (X3)	Secara simultan maupun parsial mendukung hipotesis bahwa kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran SKPD pada Pemerintah Kota Banda Aceh.

	Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh		
Nugroho R., & Alfarisi S. (2017)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan)	Variabel Dependen (Y) Penyerapan Anggaran Variabel Independen (X) Perencanaan Anggaran (X1), Pelaksanaan Anggaran (X2), SDM (X3), Pengadaan Barang Jasa (X4), dan Koordinasi dengan Sektor atau Instansi Lain (X5)	Faktor perencanaan, pelaksanaan anggaran dan koordinasi dengan instansi lain berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran instansi pemerintah. Sedangkan faktor pengadaan barang dan jasa dan faktor sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

<p>Anisa, I. Z. (2017)</p>	<p>Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten</p>	<p>Variabel Dependen (Y) Penyerapan Anggaran Variabel Independen (X) Perencanaan Anggaran (X1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X2), dan Pelaksanaan Anggaran (X3)</p>	<p>Menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Provinsi Banten.</p>
<p>Putri, K. M. R., dkk (2017)</p>	<p>Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran</p>	<p>Variabel Dependen (Y) Penyerapan Anggaran Variabel Independen (X) Perencanaan Anggaran (X1), Sumber Daya Manusia (X2), dan</p>	<p>Menyatakan bahwa variabel perencanaan anggaran (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran; variabel kualitas sumber daya manusia (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap</p>

	(Survei Pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)	Komitmen Organisasi (X3)	penyerapan anggaran; dan variabel komitmen organisasi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.
Jauhari (2017)	Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II	Variabel Dependen (Y) Serapan Anggaran Variabel Independen (X) Perencanaan Anggaran (X1) dan Pelaksanaan Anggaran (X2)	Menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh baik secara simultan maupun secara parsial terhadap penyerapan anggaran satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan kerangka hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran sebagai variabel independen mempengaruhi variabel dependen yaitu tingkat penyerapan anggaran.

2.2.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka tertentu. Aspek perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran akan berdampak pada tidak akan berjalannya program kerja dengan baik, hal ini dikarenakan tidak selarasnya antara perencanaan anggaran dengan program kerja yang akan dilaksanakan sehingga menjadi salah satu faktor penyebab minimnya penyerapan anggaran (Arif & Halim dalam Putri dkk, 2017). Perencanaan yang baik, meliputi penyusunan kegiatan dan anggaran yang detail, tidak adanya anggaran yang diblokir, serta tidak adanya tambahan anggaran sangat menentukan penarikan dana tepat waktu.

2.2.2 Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Faktor terpenting dalam pelaksanaan anggaran adalah proses pelaksanaan itu sendiri. Walaupun sudah direncanakan dengan baik, tetapi jika dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala yang mengakibatkan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal

maupun tidak sesuai dengan rencana sebelumnya maka realisasi anggaran juga sangat dimungkinkan tidak akan tepat waktu (Nugroho dan Alfarisi, 2017). Kendala yang sering terjadi, meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja, proses pengadaan barang dan jasa, serta proses mekanisme pembayaran atau pencairan anggaran. Ketiga hal tersebut mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran.

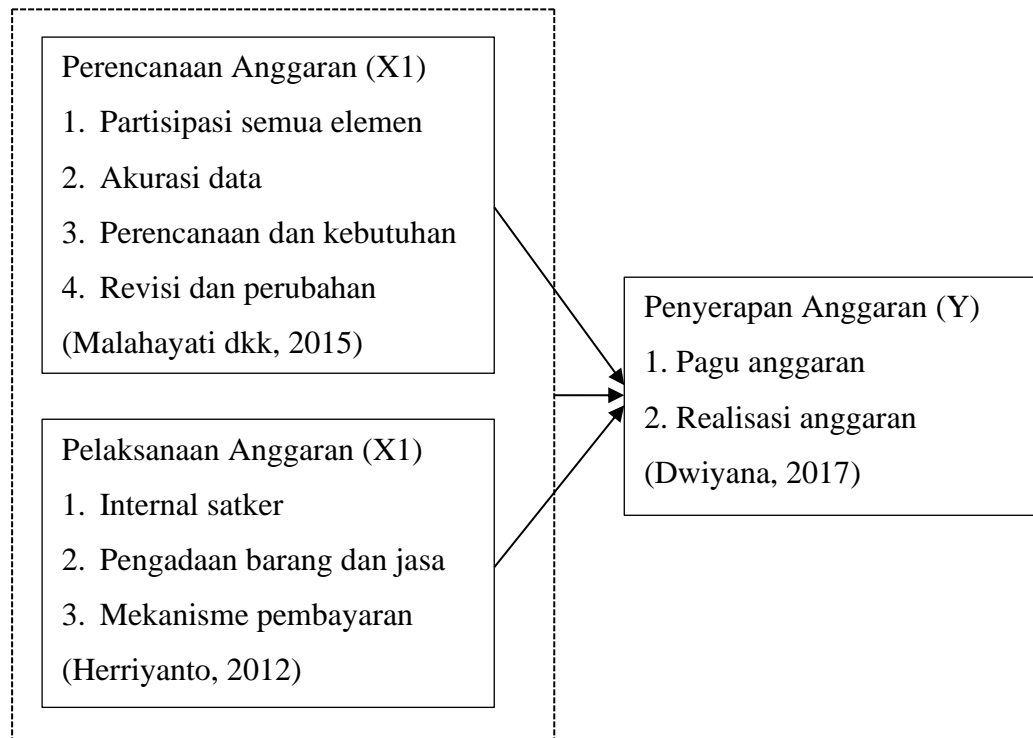
Satuan kerja juga lebih menugutamakan kelengkapan administrasi daripada kecepatan dan ketepatan pencairan dana dalam realisasi pelaksanaan anggaran. Hal ini mengidentifikasi bahwa persyaratan administrasi belum bisa berjalan beriringan dengan proses pencairan anggaran, hal ini mengakibatkan penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun (Kuswoyo dalam Malahayati dkk, 2012). Hasil penelitian Herriyanto (dalam Jauhari, 2017) menunjukkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran dan akan berdampak pada mekanisme pembayaran atau pencairan anggaran.

2.2.3 Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang telah disetujui untuk dibelanjakan (Putri, dkk 2017). Kesejahteraan rakyat yang meningkat dapat tercermin dari tingkat penyerapan anggaran pemerintah. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa fungsi anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi,

berperan untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian, serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Buruknya kualitas penyerapan anggaran akan berpengaruh pada perekonomian nasional secara keseluruhan, seperti efektivitas alokasi belanja yang ditujukan untuk pembangunan negara menjadi tidak tepat sasaran.

Rendahnya penyerapan anggaran dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja suatu organisasi. Penyerapan anggaran yang rendah menunjukkan adanya persoalan yang serius pada lingkup pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang selalu saja terulang di setiap tahunnya, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka dari itu, pelaksanaan anggaran yang merupakan implementasi dari perencanaan anggaran yang telah disusun sebelumnya menjadi salah satu faktor terpenting dalam menilai baik atau buruknya penyerapan anggaran. Malahayati dkk, (2015) mengemukakan bahwa perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

Sumber: Pengolahan Data, 2019

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, tinjauan pustaka, dan kerangka konseptual penelitian, serta beberapa penelitian terdahulu maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Terdapat pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

H₂ : Terdapat pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

H₃ : Perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh secara simultan terhadap penyerapan

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017:41) objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan reliabel. Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian adalah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan penyerapan anggaran.

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Tempat merupakan daerah atau wilayah dimana subjek atau objek penelitian yang hendak diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I. Alasan dipilihnya instansi tersebut sebagai lokasi penelitian didasari oleh beberapa pertimbangan, diantaranya sebagai berikut:

1. KPPN Bandung I selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, bertugas dalam proses pencairan dana APBN yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkup pembayaran KPPN Bandung I.
2. KPPN Bandung I merupakan kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bawah Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Kota Bandung sehingga memudahkan peneliti melakukan penelitian.

3. Mempunyai beban kerja yang besar dengan jumlah satuan kerja yang dilayani lebih banyak yaitu 172 satker dari 29 Kementerian/Lembaga meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara dalam pengumpulan data penelitian yang digunakan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2017:2) yang dimaksud metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

3.2.1 Metode yang Digunakan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:8) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif verifikatif karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual mengenai fakta-fakta, serta hubungan antar variabel-variabel yang diteliti.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Menurut Sekaran (2017:77) variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

1. Variabel Independen

Menurut Sekaran (2017:79) variabel independen atau variabel bebas adalah yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif. Yaitu, jika ada variabel bebas, variabel terikat juga hadir dan dengan setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat. Dengan kata lain, varians dalam variabel terikat disebabkan oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Perencanaan Anggaran (X1) dan Pelaksanaan Anggaran (X2).

2. Variabel Dependen

Menurut Sekaran (2017:77) variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel terikat, atau menjelaskan variabilitasnya, atau memprediksinya. Dengan kata lain, variabel terikat merupakan variabel utama yang sesuai dalam investigasi. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen (Y) adalah Penyerapan Anggaran yang merupakan proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran.

Adapun operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Perencanaan Anggaran (X1)	Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi semua elemen 2. Akurasi data 3. Perencanaan dan kebutuhan 4. Revisi dan perubahan (Malahayati dkk, 2015)	Ordinal dan Interval
Pelaksanaan Anggaran (X2)	Pelaksanaan anggaran adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. (BPKP, 2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal satker 2. Pengadaan barang dan jasa 3. Mekanisme pembayaran (Herriyanto, 2012)	Ordinal dan Interval

Penyerapan Anggaran (Y)	Penyerapan anggaran satuan kerja adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. (Noviwijaya & Rohman, 2013)	1. Pagu Anggaran 2. Realisasi Anggaran (Dwiyana, 2017)	Ordinal dan Interval
-------------------------	--	--	----------------------

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019

3.2.3 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

3.2.3.1 Populasi Penelitian

Dalam penelitian ilmiah ini, tidak terlepas dari sumber data yaitu populasi dan sampel. Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I yang berjumlah 172 satker dari 29 Kementerian/Lembaga meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Daftar populasi penelitian terlampir.

3.2.3.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Terdapat 2 jenis *sampling* yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2015:368) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu.

Dalam menentukan sampel yang akan dipilih, peneliti menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10% karena dalam setiap penelitian tidak mungkin hasilnya sempurna 100%. Semakin besar tingkat kesalahan maka semakin sedikit ukuran sampel. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel Minimal

N = Jumlah Populasi

e = *Tolerance Error* (Toleransi Kesalahan)

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 172 satuan kerja dan persentase kesalahan yang ditetapkan sebesar 10%. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{172}{1+172(0.1)^2} = 63,235 \quad \text{dibulatkan menjadi 63 responden.}$$

Dari hasil perhitungan sesuai formula diatas diperoleh sampel sebanyak 63 responden dari satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Bandung I. Adapun responden dari masing-masing satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I adalah salah satu dari pengelola keuangan, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Pengelola Keuangan lainnya.

3.2.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.4.1 Sumber Data

Menurut Sekaran (2017:130-131), data primer (*primary data*) mengacu pada informasi yang diperoleh langsung (dari tangan pertama) oleh peneliti terkait dengan variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi. Data sekunder (*secondery data*) mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada.

3.2.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau studi literatur dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang

diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan agar dapat menunjang data yang dikumpulkan dan mengolahnya lebih lanjut dalam penelitian ini.

2. Kuesioner

Menurut sekaran (2017:170) kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya dimana responden akan mencatat jawaban mereka, biasanya dengan alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Untuk mempermudah perhitungan setiap pertanyaan dari hasil kuisisioner, maka ada 5 (lima) kemungkinan skala *likert*. Skala *likert* mempunyai interval 1-5. Untuk jawaban yang mendukung pertanyaan atau pernyataan diberi skor tertinggi dan untuk jawaban yang tidak mendukung diberi skor terendah. Adapun pemberian skor tersebut adalah:

Tabel 3.2 Ukuran Penilaian Untuk Variabel X1, X2, Y

Skor	Kriteria
5	Sangat Tinggi/Selalu/Sangat Setuju
4	Tinggi/Sering/Setuju
3	Sedang/Kadang-Kadang/Ragu-Ragu
2	Rendah/Pernah/Tidak Setuju
1	Sangat Rendah/Tidak Pernah/Sangat Tidak Setuju

Sumber: Sugiyono (2017:94)

3.2.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017) analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan.

3.2.6 Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian merupakan suatu cara untuk mengukur, mengolah dan menganalisis data. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan (Sugiyono, 2017:102). Data yang akan dianalisis merupakan data hasil survei dari lapangan (kuesioner). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner maka diperlukan suatu alat ukur skala tes yang valid dan dapat diandalkan, agar kesimpulan penelitian tidak keliru dan tidak memberikan gambaran yang jauh berbeda dengan keadaan sebenarnya.

Data yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner selanjutnya akan di analisis dengan menghitung masing-masing skor dari setiap pernyataan sehingga dapat disimpulkan mengenai kondisi item instrumen pernyataan pada objek yang diteliti.

3.2.6.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:147) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Untuk menganalisis setiap pertanyaan, pernyataan, atau indikator hitung frekuensi jawaban setiap kategori (pilihan jawaban) dan jumlahkan.

Setiap variabel penelitian, harus menetapkan peringkat dengan membandingkan skor aktual dan ideal. Skor aktual diperoleh melalui hasil perhitungan seluruh tanggapan responden, sedangkan skor ideal diperoleh dari prediksi nilai tertinggi dikalikan dengan dikalikan dengan jumlah responden. Apabila digambarkan dengan rumus maka akan tampak seperti di bawah ini:

$$\% \text{ Skor} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Keterangan:

Skor Aktual = Jumlah skor jawaban responden

Skor Ideal = jumlah skor maksimum (jumlah responden \times 5)

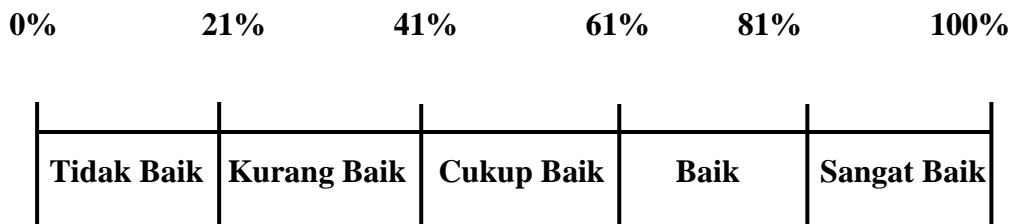
Setelah setiap indikator mempunyai jumlah, selanjutnya peneliti membuat garis kontinum.

Tabel 3.3 Kriteria Persentase Skor Tanggapan Responden

No.	% Jumlah Skor	Kriteria
1	0%-20%	Tidak Baik
2	21%-40%	Kurang Baik
3	41%-60%	Cukup
4	61%-80%	Baik
5	81%-100%	Sangat Baik

Sumber: Sugiyono (2013:134)

Berikut adalah garis kontinum yang digunakan untuk memudahkan peneliti melihat kategori penilaian mengenai variabel penelitian.



Gambar 3.1 Garis Kontinum

Sumber: Sugiyono (2017:184)

3.2.6.2 Uji Validitas

Menurut Ghazali (2016:53) uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid, jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengukur variabel yang ingin diukur. Rumus yang digunakan untuk menguji validitas instrumen ini adalah teknik korelasi melalui Korelasi Produk Momen Pearson (*Bivariate Pearson*).

Menurut Ghozali (2016:53) uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dan nilai r_{tabel} untuk *degrre of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini (n) adalah jumlah sampel. Jika koefisien korelasi (r) bernilai positif dan lebih besar dari r_{tabel} maka dinyatakan bahwa butir pertanyaan tersebut valid atau sah. Sebaliknya, jika bernilai negatif atau positif namun lebih kecil dari r_{tabel} maka butir pertanyaan dinyatakan tidak valid.

3.2.6.3 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016:43) uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Pengujian reliabilitas dilakukan hanya pada indikator-indikator yang telah melalui pengujian validitas dan dinyatakan valid. Untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2016:43), yaitu jika koefisien *Cronbach's Alpha* $> 0,70$.

3.2.6.4 Method of Successive Interval (MSI)

Setelah memperoleh data dari hasil penyebaran kuesioner, di mana yang awalnya ordinal dirubah menjadi skala interval karena dalam penggunaan analisis linier, data yang diperoleh harus menggunakan data dengan skala interval. Menurut Sedarmayanti & Hidayat (2011) *Method of Successive Interval* (MSI) adalah metode penskalaan untuk menaikkan skala pengukuran ordinal ke skala pengukuran interval. Berdasarkan konsep tersebut, dapat ditinjau bahwa MSI merupakan alat untuk mengubah data ordinal menjadi interval.

Untuk menemukan kategori jawaban responden terdapat masing-masing alternatif, terlebih dulu skala ordinal ditransformasikan menjadi skala interval dengan menggunakan teknik *Method of Successive Interval* (MSI). Langkah-langkah transformasi data ordinal ke data interval, yaitu:

1. Menghitung frekuensi setiap pilihan jawaban responden pada setiap pertanyaan atau pernyataan.
2. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pertanyaan atau pernyataan, dilakukan perhitungan proporsi kumulatif untuk setiap pilihan jawaban.
3. Menentukan nilai batas Z (tabel normal) untuk setiap pertanyaan atau pernyataan dan setiap pilihan jawaban.
4. Menentukan nilai identitas. Menentukan nilai interval rata-rata untuk setiap pilhan jawaban melalui persamaan sebagai berikut:

$$SCALE\ VALUE = \frac{(Density\ at\ Lower\ Limit) - (Density\ at\ Upper\ Limit)}{(Area\ Below\ Upper\ Limit) - (Area\ Below\ Lower\ Limit)}$$

Keterangan:

Density at lower Limit = kepadatan batas bawah

Density at upper limit = kepadatan batas atas

Area below upper limit = daerah di batas atas

Area below lower limit = daerah di batas bawah

5. Menentukan nilai transformasi atau Nilai Skala (NS) dengan rumus:

$$Y = NS + (1 + |1 + |NS_{\min} |)$$

3.2.6.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2017:277) analisis regresi berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel independen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi, analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua (2). Dengan analisis regresi akan diketahui variabel independen yang benar-benar signifikan mempengaruhi variabel dependen dengan variabel independen yang signifikan tadi dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen. Model regresi linier sesungguhnya mengasumsikan bahwa terdapat hubungan linier antara variabel dependen dengan setiap variabel independen.

Menurut Sugiyono (2013:277) persamaan regresi linier berganda yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = penyerapan anggaran

a = koefisien konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3 \dots$ = koefisien regresi

x_1 = perencanaan anggaran

x_2 = pelaksanaan anggaran

ε = *error*/variabel gangguan

3.2.6.6 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) menurut Ghozali (2016:95) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Suharyadi dan Purwanto (2016:233) koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi (*regression of sum square-RSS*) terhadap varian total (*total sum of squares-TSS*).

Nilai R^2 akan berkisar 0 sampai 1. Nilai $R^2 = 1$ menunjukkan bahwa 100% total varian diterangkan oleh varian persamaan regresi atau variabel bebas, baik X_1 dan X_2 mampu menerangkan variabel Y sebesar 100%. Sebaliknya, apabila nilai $R^2 = 0$ menunjukkan bahwa tidak ada total varian yang diterangkan oleh varian bebas dari persamaan regresi, baik X_1 maupun X_2 .

3.2.7 Pengujian Hipotesis

Menurut Sekaran (2017:94) hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara namun dapat diuji, yang memprediksi apa yang ingin ditemukan dalam data empiris. Hipotesis dibuat dari teori yang menjadi dasar dari model konseptual dan seringkali berhubungan dengan sifatnya.

3.2.7.1 Uji Secara Parsial (U=Uji t)

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel bebas yang lain tidak berubah dengan ketentuan taraf signifikansinya 5% atau 0,05. Berikut kriteria uji t:

- a. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

- b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Berikut rumusan hipotesis secara statistik:

1. Untuk variabel perencanaan anggaran

H_0 : perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

H_1 : perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

2. Untuk variabel pelaksanaan anggaran

H_0 : pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

H_2 : pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

3.2.7.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2016:96) uji f ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Pengujian dilakukan dengan tingkat 5% atau 0,05. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis diterima. Ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan:

- a. Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima atau signifikan.
- b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak atau tidak signifikan.

Uji F yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran, yaitu:

H_0 : tidak terdapat pengaruh antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

H_3 : terdapat pengaruh antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti memperoleh data hasil kuesioner mengenai perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran satuan kerja di wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 63 responden dari masing-masing satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Bandung I yang terdiri dari 28 item pernyataan kuesioner.

4.1.1 Karakteristik Data Responden

Karakteristik data responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama bekerja, jabatan, dan kursus/diklat/bimtek di bidang akuntansi, keuangan dan penyerapan anggaran belanja yang telah diikuti oleh responden.

4.1.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	55	87%
Perempuan	8	13%
Jumlah	63	100%

Sumber: Pengolahan Data, 2019

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebanyak 55 responden atau sebesar 87%, sedangkan sisanya adalah jenis kelamin perempuan sebanyak 8 responden atau sebesar 13%.

4.1.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase
20-30	9	14%
31-40	24	38%
41-50	20	32%
>51	10	16%
Jumlah	63	100%

Sumber: Pengolahan Data, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 9 responden atau sebesar 14%, yang berusia 31-40 tahun sebanyak 24 responden atau sebesar 38% dan yang berusia 41-50 tahun sebanyak 20 responden atau sebesar 32%, serta yang berusia > 51 tahun sebanyak 10 responden atau sebesar 16%. Artinya, mayoritas responden berusia 31-40 tahun.

4.1.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Table 4.3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase
SLTA/Sederajat	21	33%
Diploma (D3)	9	14%
Strata 1 (Sarjana)	27	43%
Strata 2 (Master)	6	10%
Strata 3 (Doktor)	0	0%
Jumlah	63	100%

Sumber: Pengolahan Data, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa mayoritas pendidikan terakhir responden adalah Strata 1 (Sarjana) sebanyak 27 Responden atau sebesar 43%, sedangkan sisanya memiliki pendidikan terakhir SLTA/Sederajat sebanyak 21 responden atau sebesar 33%, Diploma (D3) sebanyak 9 responden atau sebesar 14%, serta Strata 2 (Master) sebanyak 6 responden atau sebesar 10%.

4.1.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase
1-10 Tahun	19	30%
11-20 Tahun	29	46%
21-30 Tahun	11	17%
31-40 Tahun	4	6%
Jumlah	63	100%

Sumber: Pengolahan Data, 2019

Berdasarkan tabel diatas, mayoritas responden telah bekerja selama 11-20 tahun sebanyak 29 responden atau sebesar 46%, bekerja selama 1-10 tahun sebanyak 19 responden atau sebesar 30%, dan bekerja selama 21-30 tahun sebanyak 11 responden atau sebesar 17%, serta bekerja selama 31-40 tahun sebanyak 4 responden atau sebesar 6%.

4.1.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Karakteristik responden berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Profil Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Responden	Persentase
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	0	0%
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	0	0%
Pejabat Penandatangan SPM	3	5%
Bendahara Pengeluaran	14	22%
Pejabat Pengelola Keuangan Lainnya	46	73%
Jumlah	63	100%

Sumber: Pengolahan Data, 2019

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden berjabat sebagai pejabat pengelola keuangan lainnya sebanyak 46 responden atau sebesar 73%, berjabat sebagai bendahara pengeluaran sebanyak 14 responden atau sebesar 22%, dan berjabat sebagai Pejabat Penandatangan SPM sebanyak 3 responden atau sebesar 5%.

4.1.1.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Kursus/Diklat/Bimtek di Bidang Akuntansi, Keuangan dan Penyerapan Anggaran Belanja yang Telah Diikuti

Karakteristik responden berdasarkan kursus/diklat/bimtek di bidang akuntansi, keuangan, dan penyerapan anggaran belanja yang telah diikuti dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Profil Responden Berdasarkan Kursus/Diklat/Bimtek yang Telah Diikuti

Kursus/Diklat/Bimtek	Jumlah Responden	Persentase
Tidak Pernah	11	17%
Pernah	39	62%
Jarang	5	8%
Sering	7	11%
Sangat Sering	1	2%
Jumlah	63	100%

Sumber: Pengolahan Data, 2019

Tabel 4.6 menunjukkan mayoritas responden pernah mengikuti kursus/diklat/bimtek di bidang akuntansi, keuangan, dan penyerapan anggaran belanja sebanyak 39 responden atau sebesar 62%, tidak pernah mengikuti sebanyak 11 responden atau sebesar 17%, jarang mengikuti sebanyak 5 responden atau sebesar 8%, dan sering mengikuti sebanyak 7 responden atau sebesar 11%, serta sangat sering mengikuti sebanyak 1 responden atau sebesar 2%.

4.1.2 Gambaran Variabel Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dari jawaban responden maka dibuat bobot penelitian sebagai berikut:

- Sangat Setuju : diberi bobot 5
- Setuju : diberi bobot 4
- Ragu-Ragu : diberi bobot 3
- Tidak Setuju : diberi bobot 2
- Sangat Tidak Setuju : diberi bobot 1

Untuk memudahkan penelitian dari jawaban responden maka dibuat kriteria penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.7 Kriteria Persentase Skor Tanggapan Responden

No.	% Jumlah Skor	Kriteria
1	0%-20%	Tidak Baik
2	21%-40%	Kurang Baik
3	41%-60%	Cukup
4	61%-80%	Baik
5	81%-100%	Sangat Baik

Sumber: Sugiyono (2013:134)

4.1.2.1 Gambaran Perencanaan Anggaran pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I

Deskripsi mengenai hasil penelitian terhadap 63 responden mengenai perencanaan anggaran dan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 4 indikator, yakni partisipasi semua elemen, akurasi data, perencanaan dan kebutuhan, dan revisi dan perubahan yang meliputi 10 pernyataan. Rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator akan disajikan pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Mengenai Perencanaan Anggaran (X1)

Item Pernyataan	Frekuensi Tanggapan					Jumlah	Indeks Skor Aktual	Skor Ideal	%
	SS	S	RG	TS	STS				
X1.1	31	28	3	1	0	63	278	315	88%
X1.2	15	33	11	2	2	63	246	315	78%
X1.3	16	37	5	4	1	63	252	315	80%
X1.4	12	33	10	6	2	63	236	315	75%
X1.5	22	35	6	0	0	63	268	315	85%
X1.6	18	37	4	3	1	63	257	315	82%
X1.7	15	30	17	0	1	63	247	315	78%
X1.8	18	29	14	1	1	63	251	315	80%
X1.9	7	40	12	3	1	63	238	315	76%
X1.10	12	28	17	6	0	63	235	315	75%
Total Skor							2.508	3.150	80%
Kategori							Baik		

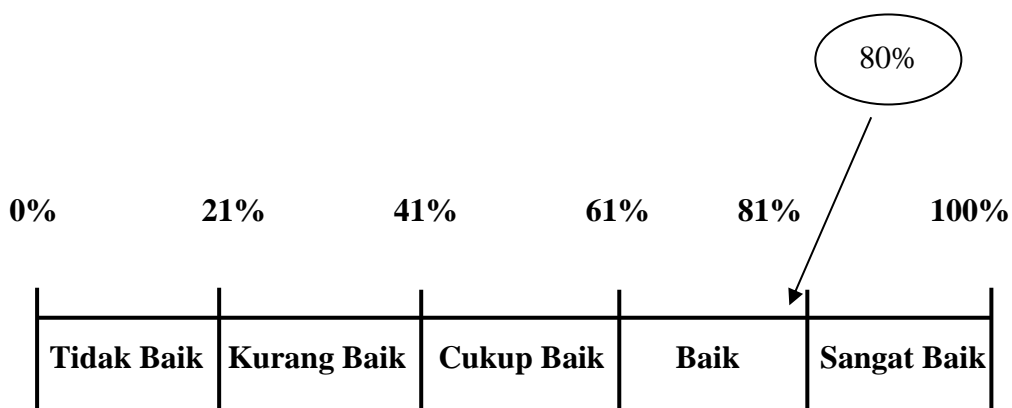
Sumber: Pengolahan Data menggunakan SPSS, 2019

$$\% \text{ Skor Total} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100$$

$$\% \text{ Skor Total} = \frac{2331}{3150} \times 100\%$$

$$= 80\%$$

Pada tabel 4.8 diatas, diketahui bahwa skor aktual yang diperoleh dari seluruh pernyataan-pernyataan yang membentuk variabel perencanaan anggaran adalah 2.508 dan skor ideal sebesar 3.150 dengan nilai persentase yang diperoleh 80%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran termasuk kategori baik. Kategori baik, jika digambarkan dengan menggunakan garis kontinum dapat dilihat seperti pada gambar 4.1.



Gambar 4.1 Garis Kontinum Kategori Perencanaan Anggaran

Sumber: Pengolahan Data, 2019

4.1.2.2 Gambaran Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I

Deskripsi mengenai hasil penelitian terhadap 63 responden mengenai pelaksanaan anggaran dan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 3 indikator, yakni internal satuan kerja, pengadaan barang dan jasa, dan mekanisme pembayaran yang meliputi 12 pernyataan. Rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator akan disajikan pada tabel 4.9.

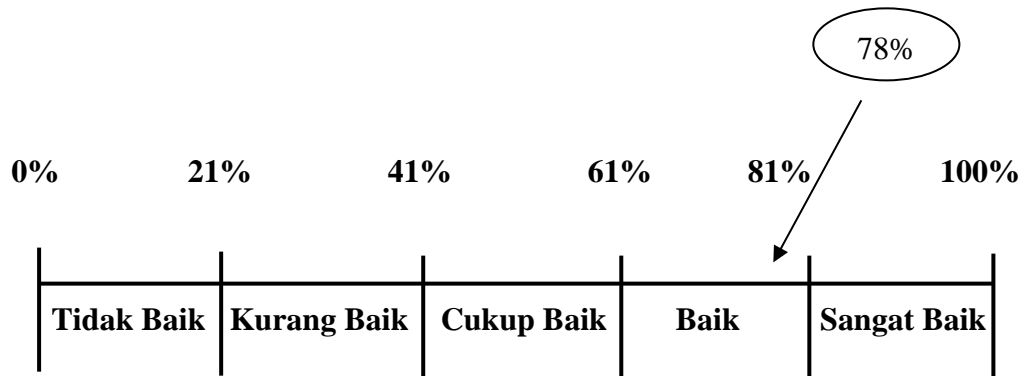
Tabel 4.9 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Anggaran (X2)

Item Pernyataan	Frekuensi Tanggapan					Jumlah	Indeks Skor Aktual	Skor Ideal	%
	SS	S	RG	TS	STS				
X2.1	18	34	7	4	0	63	255	315	81%
X2.2	10	26	12	13	2	63	218	315	69%
X2.3	12	33	6	6	6	63	228	315	72%
X2.4	26	29	6	2	0	63	268	315	85%
X2.5	26	35	2	0	0	63	276	315	88%
X2.6	20	35	7	1	0	63	263	315	85%
X2.7	5	46	10	2	0	63	243	315	77%
X2.8	4	31	23	5	0	63	223	315	71%
X2.9	7	38	17	1	0	63	240	315	76%
X2.10	7	42	8	5	1	63	238	315	75%
X2.11	8	39	12	3	1	63	239	315	76%
X2.12	15	31	11	4	2	63	242	315	77%
Total Skor							2.933	3.780	78%
Kategori							Baik		

Sumber: Pengolahan Data menggunakan SPSS, 2019

Pada tabel 4.9 diatas, diketahui bahwa skor aktual yang diperoleh dari seluruh pernyataan-pernyataan yang membentuk variabel pelaksanaan anggaran adalah 2.933 dan skor ideal sebesar 3.780 dengan nilai persentase yang diperoleh 78%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran termasuk kategori baik.

Kategori baik, jika digambarkan dengan menggunakan garis kontinum dapat dilihat seperti pada gambar 4.2.



Gambar 4.2 Garis Kontinum Kategori Pelaksanaan Anggaran

Sumber: Pengolahan Data, 2019

4.1.2.3 Gambaran Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I

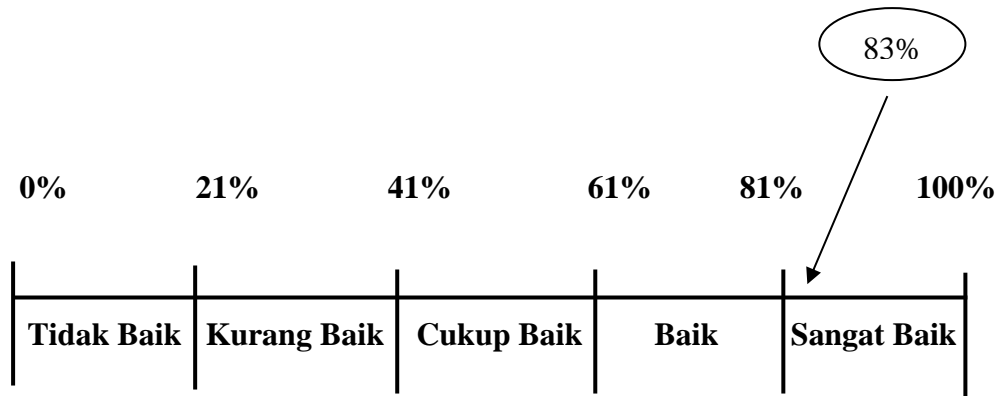
Deskripsi mengenai hasil penelitian terhadap 63 responden mengenai penyerapan anggaran dan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 2 indikator, yakni pagu dan realisasi anggaran yang meliputi 6 pernyataan. Rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator akan disajikan pada tabel 4.10.

Tabel 4.10 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Mengenai Penyerapan Anggaran (Y)

Item Pernyataan	Frekuensi Tanggapan					Jumlah	Indeks Skor Aktual	Skor Ideal	%
	SS	S	RG	TS	STS				
Y.1	28	34	0	1	0	63	278	315	88%
Y.2	30	32	1	0	0	63	281	315	89%
Y.3	13	35	11	2	2	63	244	315	77%
Y.4	15	39	8	1	0	63	257	315	82%
Y.5	20	35	7	1	0	63	263	315	83%
Y.6	9	40	10	4	0	63	243	315	77%
Total Skor							1.566	1.890	83%
Kategori							Sangat Baik		

Sumber: Pengolahan Data menggunakan SPSS, 2019

Pada tabel 4.10 diatas, diketahui bahwa skor aktual yang diperoleh dari seluruh pernyataan-pernyataan yang membentuk variabel penyerapan anggaran adalah 1.566 dan skor ideal sebesar 1.890 dengan nilai persentase yang diperoleh 83%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran termasuk kategori sangat baik. Kategori sangat baik, jika digambarkan dengan menggunakan garis kontinum dapat dilihat seperti pada gambar 4.3.



Gambar 4.3 Garis Kontinum Kategori Penyerapan Anggaran

Sumber: Pengolahan Data, 2019

4.1.3 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016:53) uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuisioner dikatakan valid, jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengukur variabel yang ingin diukur. Pengujian ini dilakukan dengan mengkorelasi skor jawaban responden dari setiap pernyataan. Nilai r_{hitung} dibandingkan dengan nilai r_{tabel} , jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid.

Pengujian validitas ini dilakukan setelah skala kuesioner yang diisi oleh responden ditetapkan dan dilakukan penilaian, setelah itu pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program aplikasi SPSS v.23. Dengan nilai r_{tabel} untuk df adalah $63-2 = 61$, jumlah sampel (n) = 63. Dengan $df = 61$ dan $\alpha = 0,05$ maka didapat $r_{tabel} = 0,248$. Hasil pengolahan data uji validitas yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Variabel Perencanaan Anggaran

No.Item	Pearson Correlation	Nilai r_{tabel}	Kriteria
X1.1	0,336	0,248	Valid
X1.2	0,641	0,248	Valid
X1.3	0,691	0,248	Valid
X1.4	0,516	0,248	Valid
X1.5	0,564	0,248	Valid
X1.6	0,467	0,248	Valid
X1.7	0,488	0,248	Valid
X1.8	0,445	0,248	Valid
X1.9	0,669	0,248	Valid
X1.10	0,544	0,248	Valid

Sumber: Pengolahan Data, 2019

Hasil perhitungan uji validitas pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran (X1) yang memiliki 10 pernyataan kuesioner dinyatakan valid karena memiliki nilai $r_{\text{hitung}} > 0,248$ dan dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya yaitu uji reliabilitas.

Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Variabel Pelaksanaan Anggaran

No.Item	Pearson Correlation	Nilai r_{tabel}	Kriteria
X2.1	0,670	0,248	Valid
X2.2	0,599	0,248	Valid
X2.3	0,675	0,248	Valid
X2.4	0,260	0,248	Valid
X2.5	0,338	0,248	Valid
X2.6	0,415	0,248	Valid
X2.7	0,476	0,248	Valid
X2.8	0,310	0,248	Valid
X2.9	0,540	0,248	Valid
X2.10	0,569	0,248	Valid

X2.11	0,325	0,248	Valid
X2.12	0,589	0,248	Valid

Sumber: Pengolahan Data, 2019

Hasil perhitungan uji validitas pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran (X2) yang memiliki 12 pernyataan kuesioner dinyatakan valid karena memiliki nilai $r_{hitung} > 0,248$ dan dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya yaitu uji reliabilitas.

Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Variabel Penyerapan Anggaran

No.Item	Pearson Correlation	Nilai r_{tabel}	Kriteria
Y.1	0,657	0,248	Valid
Y.2	0,593	0,248	Valid
Y.3	0,688	0,248	Valid
Y.4	0,742	0,248	Valid
Y.5	0,769	0,248	Valid
Y.6	0,522	0,248	Valid

Sumber: Pengolahan Data, 2019

Hasil perhitungan uji validitas pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa variabel penyerapan anggaran (Y) yang memiliki 6 pernyataan kuesioner dinyatakan valid karena memiliki nilai $r_{hitung} > 0,248$ dan dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya yaitu uji reliabilitas.

4.1.4 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016:43) uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Pengujian reliabilitas dilakukan hanya pada indikator-indikator yang telah melalui pengujian validitas dan dinyatakan valid. Pengujian reliabilitas dengan menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2016:43) yaitu jika koefisien *Cronbach's Alpha* $> 0,70$, walaupun nilai $0,60 - 0,70$ masih dapat diterima (Hair *et al*, 2010). Hasil uji reliabilitas masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Perencanaan Anggaran

Cronbach's Alpha	N of Items
0,723	10

Sumber: Pengolahan Data, 2019

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa instrumen variabel perencanaan anggaran (X1) memiliki *Cronbach's Alpha* sebesar 0,723 atau lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel perencanaan anggaran dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pelaksanaan Anggaran

Cronbach's Alpha	N of Items
0,708	12

Sumber: Pengolahan Data, 2019

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa instrumen variabel perencanaan anggaran (X2) memiliki *Cronbach's Alpha* sebesar 0,708 atau lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel pelaksanaan anggaran dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penyerapan Anggaran

Cronbach's Alpha	N of Items
0,733	6

Sumber: Pengolahan Data, 2019

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa instrumen variabel perencanaan anggaran (Y) memiliki *Cronbach's Alpha* sebesar 0,733 atau lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel penyerapan anggaran dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 *Method of Successive Interval*

Setelah memperoleh data dari hasil penyebaran kuesioner, di mana yang awalnya ordinal dirubah menjadi skala interval karena dalam penggunaan analisis linier, data yang diperoleh harus menggunakan data dengan skala interval. Menurut Sedarmayanti dan Hidayat (2011) untuk menemukan kategori jawaban responden terdapat masing-masing alternatif terlebih dahulu skala ordinal ditransformasikan menjadi skala interval dengan menggunakan teknik *Method of Successive Interval* (MSI).

Data yang diperoleh untuk melakukan penelitian ini yaitu dengan melakukan penyebaran kuesioner. Hasil yang diperoleh dari penyebaran kuesioner ini adalah data ordinal, di mana untuk melakukan pengujian selanjutnya diperlukan data interval. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari hasil kuesioner tersebut perlu dilakukan perubahan atau transformasi menjadi data interval dengan menggunakan metode interval berurutan (*method of successive interval*).

4.2.2 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Persamaan regresi menggunakan rumus:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \varepsilon$$

Tabel 4.17 Hasil Perhitungan Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6,019	3,350		1,797	,077		
Perencanaan Anggaran	,301	,084	,423	3,603	,001	,735	1,361
Pelaksanaan Anggaran	,193	,077	,294	2,506	,015	,735	1,361

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber: Pengolahan Data menggunakan SPSS, 2019

Dari hasil regresi pada tabel tersebut, maka dapat dibentuk sebuah persamaan linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 6,019 + 0,301x_1 + 0,193x_2$$

Keterangan:

Y = Penyerapan Anggaran

X1 = Perencanaan Anggaran

X2 = Pelaksanaan Anggaran

Nilai konstanta (a) sebesar 6,019 menyatakan bahwa, jika tidak ada kenaikan nilai variabel perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran maka penyerapan anggaran akan bertambah sebesar 6,019.

Koefisien regresi ganda sebesar 0,301 dan 0,193 menyatakan bahwa setiap kenaikan perencanaan anggaran satu satuan, begitupun kenaikan pelaksanaan anggaran satu satuan maka variabel penyerapan anggaran akan naik sebesar 0,301 dan 0,193 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4.2.3 Analisis Koefisien Determinasi

Cara untuk mengetahui persentasi pengaruh dari variabel bebas perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran maka digunakan rumus koefisien determinasi dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.18 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,627 ^a	,393	,373	2,846432	1,683

a. Predictors: (Constant), Pelaksanaan Anggaran, Perencanaan Anggaran

b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber: Pengolahan Data menggunakan SPSS, 2019

Dengan demikian, maka diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 39,3% yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran memberikan pengaruh secara simultan (bersama-sama) sebesar 39,3% terhadap penyerapan anggaran, sedangkan sisanya 60,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

4.2.4 Pengujian Hipotesis

4.2.4.1 Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap penyerapan anggaran maka digunakan statistik uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

H_0 : perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

H_1 : perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

H_2 : pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Tabel 4.19 Hasil Perhitungan Uji t Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Model	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig.	A	Keterangan	Kesimpulan
X1 → Y	3,603	2,000	0,001	0,05	H ₁ diterima	Signifikan

Sumber: Pengolahan Data menggunakan SPSS, 2017

Berdasarkan tabel 4.19 diketahui bahwa hasil perhitungan t_{hitung} sebesar 3,603 dan t_{tabel} sebesar 2,000 serta kolom Sig sebesar 0,001 maka dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,603 > 2,000$) dan nilai sig $0,001 < 0,05$ yang berarti bahwa secara parsial variabel perencanaan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran.

Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Uji t Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Model	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig.	A	Keterangan	Kesimpulan
X2 → Y	2,503	2,000	0,015	0,05	H ₂ diterima	Signifikan

Sumber: Pengolahan Data menggunakan SPSS, 2017

Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa hasil perhitungan t_{hitung} sebesar 2,503 dan t_{tabel} sebesar 2,000 serta kolom Sig. sebesar 0,015 maka dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,503 > 2,000$) dan nilai Sig. $0,015 < 0,05$ yang berarti bahwa secara parsial variabel pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran.

4.2.4.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan atau tidak terhadap penyerapan anggaran, maka digunakan statistik uji F dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

H_0 : tidak terdapat pengaruh antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

H_3 : terdapat pengaruh antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

Tabel 4.21 Hasil Perhitungan Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	314,937	2	157,469	19,435	,000 ^b
	Residual	486,131	60	8,102		
	Total	801,068	62			

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

b. Predictors: (Constant), Pelaksanaan Anggaran, Perencanaan Anggaran

Sumber: Pengolahan Data menggunakan SPSS, 2019

Dari tabel diatas, dilakukan pengujian dan regresi antara variabel X1 dan X2 terhadap Y dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, F_{tabel} pada jumlah $n = 63$ dan jumlah variabel bebas (k) = 2, sehingga dapat diketahui jika penyebut = $n-k$ ($63-2$) = 61 yaitu sebesar 3,15. Maka dapat dilihat dari tabel 4.23 nilai F_{hitung} 19,435 > F_{tabel} 3,15, artinya H_0 ditolak. Selain itu, dapat dilihat dari tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Perencanaan Anggaran pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I dapat dikatakan secara keseluruhan perencanaan anggaran termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tanggapan responden pada tabel 4.8 mengenai perencanaan anggaran yang diukur dengan 4 indikator, meliputi 10 pernyataan dengan skor aktual sebesar 2.508 dan skor ideal sebesar 3.150 dengan nilai persentase yang diperoleh 80%. Berdasarkan persentase tersebut, maka perencanaan anggaran dapat dikatakan sangat baik karena kriteria garis kontinum antara 81% - 100% termasuk kriteria baik.

Jika dilihat dari jawaban responden untuk beberapa pernyataan menunjukkan masih adanya responden yang menjawab pada skala 3, 2, dan 1 atau menjawab rendah pada variabel perencanaan anggaran. Artinya, meskipun perencanaan anggaran dalam kategori baik, namun masih menunjukkan adanya

kelemahan pada perencanaan anggaran satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I.

4.3.2 Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I dapat dikatakan secara keseluruhan perencanaan anggaran termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tanggapan responden pada tabel 4.9 mengenai pelaksanaan anggaran yang diukur dengan 4 indikator, meliputi 12 pernyataan dengan skor aktual sebesar 2.933 dan skor ideal sebesar 3.380 dengan nilai persentase yang diperoleh 78%. Berdasarkan persentase tersebut, maka perencanaan anggaran dapat dikatakan baik karena kriteria garis kontinum antara 61% - 80% termasuk kriteria baik.

Jika dilihat dari jawaban responden untuk beberapa pernyataan menunjukkan masih adanya responden yang menjawab pada skala 3, 2, dan 1 atau menjawab rendah pada variabel pelaksanaan anggaran. Artinya, meskipun pelaksanaan anggaran dalam kategori baik, namun masih menunjukkan adanya kelemahan pada pelaksanaan anggaran satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I.

4.3.3 Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I dapat dikatakan secara keseluruhan penyerapan anggaran termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari

tanggapan responden pada tabel 4.10 mengenai pelaksanaan anggaran yang diukur dengan 2 indikator, meliputi 6 pernyataan dengan skor aktual sebesar 1.566 dan skor ideal sebesar 1.890 dengan nilai persentase yang diperoleh 83%. Berdasarkan persentase yang diperoleh sebesar 83%, maka perencanaan anggaran dapat dikatakan sangat baik karena kriteria garis kontinum antara 81% - 100% termasuk kriteria sangat baik.

Jika dilihat dari jawaban responden untuk beberapa pernyataan menunjukkan masih adanya responden yang menjawab rendah pada variabel penyerapan anggaran. Artinya, meskipun penyerapan anggaran dalam kategori sangat baik, namun masih menunjukkan adanya kelemahan pada pelaksanaan anggaran satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I.

4.3.4 Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I. Dengan demikian, jika perencanaan anggaran bagian keuangan pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I meningkat baik, maka penyerapan anggaran yang dihasilkan pun akan baik.

Sebagaimana hasil laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013) bahwa besar kecilnya tingkat penyerapan anggaran belanja dalam mendanai pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh proses perencanaan anggaran dan penetapan APBN. Perencanaan anggaran memberi kontribusi besar terhadap penyerapan anggaran sehingga semakin baik perencanaan anggaran akan semakin baik pula penyerapan anggaran.

Perencanaan yang baik, meliputi penyusunan kegiatan dan anggaran yang detail, tidak adanya anggaran yang diblokir, serta tidak adanya tambahan anggaran sangat menentukan penarikan dana tepat waktu. Sebaliknya, aspek perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang akan disajikan akan berdampak pada tidak akan berjalannya program kerja dengan baik dikarenakan tidak selarasnya antara perencanaan anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan yang berdampak pada penyerapan anggaran.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Zarinah (2016) yang memberikan hasil bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Demikian juga, penelitian Putri dkk (2017) menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap perencanaan anggaran.

4.3.5 Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I. Dengan demikian, jika pelaksanaan anggaran bagian keuangan pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I meningkat baik, maka penyerapan anggaran yang dihasilkan pun akan baik.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan anggaran berkaitan dengan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Semakin baik usaha-usaha yang dilakukan oleh satuan kerja maka

semakin baik pula realisasi anggaran, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada tingkat penyerapan anggaran yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Malahayati (2015) yang memberikan hasil bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Demikian juga, penelitian Anisa (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

4.3.6 Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I. Dengan demikian, jika perencanaan dan pelaksanaan anggaran bagian keuangan pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I meningkat baik, maka penyerapan anggaran yang dihasilkan pun akan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I termasuk kategori baik.
2. Pelaksanaan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I termasuk kategori baik.
3. Penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I termasuk kategori sangat baik.
4. Perencanaan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I.
5. Pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I.
6. Perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti mencoba menyampaikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anggaran terserap tidak optimal yaitu karena adanya tambahan pagu dan masa penyusunan yang dirasa kurang cukup. Dalam hal ini, sebaiknya perencanaan kegiatan memanfaatkan waktu yang tersedia secara efektif dan efisien mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan, anggaran yang dibutuhkan, serta jadwal pelaksanaannya sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan tidak terkendala oleh anggaran yang belum tersedia atau harus menunggu anggaran yang perlu direvisi.
2. Pada tahap pelaksanaan anggaran, sebaiknya setiap satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I lebih menerapkan mekanisme *reward* dan *punishment*. Hal ini dirasa penting karena sebagai salah satu bentuk memotivasi para pegawai agar melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan sungguh-sungguh. Perlu dijadikan perhatian juga dalam hal penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang bernilai besar, harus terlebih dahulu memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang menguasai aturan teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menggunakan sampel yang lebih luas agar dapat memberikan hasil yang lebih baik. Selain itu, beberapa keterbatasan lain yang melekat pada penelitian ini berhubungan dengan pengukuran indikator variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian selanjutnya, dapat menambahkan atau memperbaiki pengukuran atau indikator dalam penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, I. Z. (2019), Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, (2)1, 84-101.
- BPKP. (2011), *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: Paris Review.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2013), *Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kursus Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dwiyana, N. (2017), Fator-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan Dengan Monitoring dan Evaluasi Sebagai Variabel Moderating. *Tesis Magister, Universitas Sumatera Utara*.
- Ghozali, I. (2016), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herriyanto. (2012), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. *Doctoral dissertation, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta*.
- <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-malang-artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barangjasa>, diunduh tanggal 12 Desember 2019.
- <https://djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/bandung1/id/data-publikasi/berita-terbaru/2812-sosialisasi-monev-semester-i-2018-kppn-bandung-i.html>, diunduh 18 Oktober 2019
- <https://junaidichaniago.wordpress.com/>, diunduh 8 Februari 2020
- <https://m.tribunnews.com/amp/bisnis/2018/05/28/evaluasi-fitra-penyerapan-anggaran-oleh-pemerintah-masih-rendah-terjadi-setiap-tahun>, diunduh 15 November 2019
- <https://www.dosenpendidikan.co.id/kebijakan-fiskal/>, diunduh 28 November 2019
- Jauhari, N. (2017), Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II. *Doctoral dissertation, Unpas*.

- Kuncoro, E. D. (2013), Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi SIPP pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Will. I Dinas Pu Prov.Kaltim. *E.Journal Administrasi Bisnis*, 1(4).
- Malahayati, C., Islahuddin, & Basri, H. (2015), Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(1).
- Mardiasmo. (2018), *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2011), *Akuntansi Sektor Publik (2ed)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Noviwijaya, A., & Rohman, A. (2013), Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang I). *Doctoral disertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis*.
- Nugroho, R., & Alfarisi, S. (2017), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). *Jurnal BPPK Volume 10 (1)*.
- Putri, K. M., Yuniarta, G. A., & Prayudi, M. A. (2018), Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 8(2).
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017), Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1).
- Sedarmayanti & Hidayat. (2011), *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju
- Sekaran, U. (2017), *Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, & Purwanto. (2011), *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, V. W. (2015), *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diunduh tanggal 20 Oktober 2019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diunduh tanggal 5 Januari 2020.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diunduh tanggal 1 November 2019.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diunduh tanggal 20 Desember 2019.
- Zarinah, M., Darwanis, & Syukriy, A. (2016), Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(1).